

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 telah menyusun tentang konsep otonomi daerah yang terdapat pada Bab VI pasal 18 disebutkan bahwa Pembagian Daerah Indonesia Atas Dasar Daerah Besar Dan Kecil, Dengan Bentuk Susunan Dan Pemerintahannya Ditetapkan dengan Undang-Undang. Pada saat ini, Perkembangan Daerah di Indonesia semakin pesat. seiring dengan adanya era baru, maka dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penyelenggaraan Otonomi Daerah. Di satu pihak Otonomi Daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah daerah yang sekarang telah diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah, memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya kesadaran untuk membangun daerah secara optimal, tidak lagi terkonsentrasi dipusat. Namun di pihak lain, otonomi daerah menghadirkan kekhawatiran munculnya “desentralisasi masalah” dan “desentralisasi kemiskinan”. Artinya pelimpahan masalah dan kemiskinan yang selama ini tidak mampu di tangani dan diselesaikan oleh pemerintah pusat. Kewajiban pemerintah pusat dalam negara kesatuan untuk menjamin sumber keuangan untuk membiayai otonom tersebut. Untuk menjamin sumber keuangan bagi daerah otonom, pemerintah harus

menjamin perimbangan keuangan pusat dengan daerah. Perimbangan ini dapat ditempuh melalui salah satu dari dua metode tersebut: pertama, perimbangan keuangan yang ditempuh dengan cara penetapan presentase tertentu bagi daerah otonom dari jenis penerimaan pusat. Dan metode kedua, perimbangan keuangan yang ditempuh dengan cara pembagian kewenangan mencari sumber pendapatan antar pusat dan daerah otonom.

Pemerintah daerah dapat terselenggara karena adanya dukungan berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintah daerah. Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijakan penganggaran meliputi pendapatan dan belanja daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan, serta penerimaan pembangunan.

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah di laporkan kepada APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintah. Dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar

belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka di harapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat.

Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif.

Dengan demikian, maka kota Pekanbaru yang merupakan Ibukota propinsi Riau harus mencari Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar. Salah satu retribusi yang menambah Pendapatan Asli Daerah yaitu retribusi parkir di Kota Pekanbaru. Maka dari itu, pemerintah kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran. Tidak berapa lama kemudian pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peratutan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 yaitu tentang Retribusi Pelayanan Dibidang Perhubungan Darat. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2009. Dengan diberlakukannya Peratutan Daerah Nomor 3 Tahun 2009, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 sudah tidak diberlakukan..

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Dibidang Perhubunga Darat diharapkan d apat memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pekanbaru,

yang dikelola oleh dinas terkait yaitu dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kota Pekanbaru dengan proses pelayanan yang cepat, efisien dan efektif.

1.2. Golongan Dan Jenis Retribusi Pada Sub Sektor Perhubungan Darat

Adapun golongan dan jenis retribusi pada sub sector perhubungan darat adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi jasa umum
- b. Retribusi perizinan tertentu
- c. Retribusi jasa usaha

1.2.1. Retribusi Jasa Umum

Jenis-jenis retribusi jasa umum ada dua, yaitu :

- a. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
- b. Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

1.2.2. Retribusi Perizinan Tertentu

Dalam Retribusi Perizinan Tertentu ada enam jenis perizinan, yaitu sebagai berikut :

- a. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
- b. Izin Usaha Angkutan Orang
- c. Izin Trayek, Izin Operasi dan Kartu Pengawasan Angkutan Orang
- d. Izin Usaha Angkutan Barang Dengan Kendaraan Umum Dan Kartu Pengawasan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Umum
- e. Izin Usaha Mobil Derek
- f. Izin Pengusahaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

1.2.3. Retribusi Jasa Usaha

Ada dua jenis Retribusi Jasa Usaha, yaitu :

- a. Jasa Usaha Penderekan Kendaraan
- b. Retibusi Jasa Terminal

Salah satu pendapatan yang besar adalah retribusi jasa umum, selain merupakan salah satu pendapatan besar, retribusi jasa umum memberikan pengaruh dalam meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan pembangunan Daerah. Dengan kebijakan yang diambil pemerintah Kota Pekanbaru, dalam kebijakan yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor.3 tahun 2009 pada Bab III tentang Retribusi Jasa Umum, dengan ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan dibuatnya Perda No.3 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat, Pemerintah Daerah sangat berharap kepada Dinas Perhubungan agar mampu menertibkan parkir - parkir yang ada, untuk segera meningkatkan pendapatan disektor Perparkiran guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kota Pekanbaru adalah pusat provinsi riau yang perkembangannya sangat pesat pada saat ini.Oleh karena itu, retribusi jasa umum merupakan retribusi yang cukup besar untuk saat ini. Dengan itu, kota Pekanbaru harus bisa mengoptimalkan potensi jasa umum yang ada di Kota Pekanbaru. Karena samapai pada saat ini masih banyak ketimpangan-ketimpangan yang ada pada penyelenggaraan dan pengelolaan perarkiran. Dengan kata lain, jika implementasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2009 berjalan dengan maksimal maka akan sangat membantu dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada saat ini, pemerintah daerah di kota Pekanbaru belum mampu mengelola retribusi jasa umum dengan baik. Hal ini disebabkan oleh ketidakdisiplinannya para anggota pemerintah dan kurang tegasnya pemerintah terhadap para pengguna jasa-usaha pelayanan umum dalam pemungutan dari sector retribusi. Padahal jika dilihat dari aktifitas yang terjadi dilapangan yang seakan-akan tidak pernah mengenal hari libur, secara tidak langsung dapat diperkirakan begitu besarnya potensi pemanfaatan perparkiran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun karena belum dikelola secara optimal baik dari perhitungan potensi yang dimiliki, pelaksanaan pemungutan, penataan, serta pengawasan terhadap pemungutan retribusi pelayanan umum itu sendiri. Sehubungan dengan hal ini Kota Pekanbaru memiliki banyak perparkiran yang seharusnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Semenjak diberlakunya perda di atas hingga saat ini dinas pehubungan, komunikasi dan informatika telah melakukan pungutan retribusi parkir sebagaimana dapat dilihat dalam table berikut ini.

Tabel. 1.1

Target dan Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun

2010 - 2013 di Kota Pekanbaru

No	Tahun	Target	Target Perubahan	Realisasi	Persentase
1	2010	4.562.261.000	4.700.000.000	5.036.522.500	107,17 %
2	2011	5.799.996.000	5.799.996.000	4.983.487.000	85,91 %
3	2012	5.799.996.000	5.444.459.500	5.152.778.000	95,43 %
4	2013	7.000.000.000	6.200.000.000	5.353.190.000	86,34 %

Sumber : *Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru Tahun 2014*

Dari tabel tersebut, dapat dilihat target dan realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum semenjak diberlakukannya perda No 3 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2011 target yang telah ditetapkan dari retribusi parkir tidak tercapai. Bahkan target yang dihasilkan pada tahun 2011 ini terjadi penurunan dari tahun sebelumnya.

Slain itu, untuk mengimplementasikan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang perhubungan darat (studi kasus retribusi parkir di tepi jalan umum) kota pekanbaru, pemerintah kota pekanbaru memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum maka pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Adapun peraturan daerah yang mengatur tentang pihak ketiga yaitu sebagai berikut :

Pasal 244

1. Penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pasal 243 Peraturan Daerah ini dapat diselenggarakan pada badan jalan dan diluar badan jalan.

2. Dalam Penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan orang atau badan.
3. Ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dalam peraturan Walikota Pekanbaru.
4. Orang atau Badan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pasal ini berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan pelayanan :
 - a. Mengatur lalu lintas kendaraan keluar masuk serta penataan parkir;
 - b. Memberikan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran;
 - c. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan

Pasal 245

- 1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pasal 244 ayat (1) dapat dilaksanakan secara tetap, khusus dan insidentil.
- 2) Penyelenggaraan parkir insidentil dapat diberikan untuk kegiatan-kegiatan dan atau keramaian yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha dalam waktu terbatas.

Kemudian pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memberikan Surat Perintah Tugas kepada pihak ketiga sebagai koordinator parkir yang telah ditetapkan oleh Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya coordinator parkir menunjuk juru parkir yang bertanggung jawab dalam memungut retribusi parkir yang telah ditentukan dalam peraturan daerah Nomor 2 tahun 2009 yaitu pada pasal 249 yang berbunyi :

1. Penyelenggaraan Fasilitas Parkir pada badan jalan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
2. Pengelolaan fasilitas parkir pada badan jalan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, perorangan maupun badan usaha.
3. Pengelolaan fasilitas parkir yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha dituangkan dalam kontrak kerja sama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru.
4. Pada ruas jalan tertentu penyelenggaraan fasilitas parkir pada badan jalan dikenakan tarif khusus dengan pertimbangan kondisi lalu lintas.
5. Pada kegiatan tertentu yang menyediakan fasilitas parkir diberlakukan Parkir insidentil.
6. Orang atau badan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) harus menunjuk dan menugaskan juru parkir yang berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan pelayanan :
 - a) mengatur lalu lintas kendaraan keluar masuk serta penataan parkir;
 - b) memberikan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran;
 - c) menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan;
 - d) melakukan pembinaan dan menyediakan pakaian seragam dan kelengkapannya;
7. Juru parkir sebagaimana di maksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada penyelenggara fasilitas parkir yang ditunjuk.

8. Juru parkir tidak dibenarkan mengalihkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pihak lain kecuali izin dari penyelenggara fasilitas parkir yang ditunjuk.
9. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pemungutan retribusi parkir tanpa izin dari Pemerintah Kota Pekanbaru atau penyelenggara fasilitas parkir yang ditunjuk.

Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 telah mengatur tentang struktur dan besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel. I.2
Pemungutan Retrebusi Parkir di tepi jalan umum Berdasarkan Jenis Kendaraan Per-hari

No	Jenis Kendaraan	Tarif	Frekuensi
1	Sepeda motor	Rp. 1.000,-	Sekali parkir
2	Mobil penumpang	Rp. 2.000,-	Sekali parkir
3	Mobil bus kecil	Rp. 2.000,-	Sekali parkir
4	Mobil bus sedang	Rp. 3.000,-	Sekali parkir
5	Mobil bus besar	Rp. 4.000,-	Sekali parkir
6	Mobil barang pikap	Rp. 2.000,-	Sekali parkir
7	Mobil barang sedang (sumbu dua)	Rp. 3.000,-	Sekali parkir
8	Mobil barang besar (sumbu dua)	Rp. 3.000,-	Sekali parkir
9	Mobil barang besar (sumbu tiga atau lebih	Rp. 3.000,-	Sekali parkir
10	Kereta tempelan	Rp. 3.000,-	Sekali parkir
11	Kereta gandengan	Rp. 3.000,-	Sekali parkir

Sumber data: *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat*

Tabel di atas menjelaskan tarif retrebusi parkir umum dengan disesuaikan jenis kendaraan dan frekuensi sekali parkir. Tarif yang telah ditetapkan di atas menjadi acuan dalam pelaksanaan nya sampai pada saat ini, akan tetapi

berdasarkan hasil wawancara penulis pada pengguna jasa parkir umum salah satunya dengan bapak Pandi (pengguna parkir sepeda motor) beliau mengatakan :

“sampai pada saat ini, saya masih bingung dengan petugas parkir di kota Pekanbaru. Kadang minta Rp. 1.000,- kadang-kadang Rp. 2.000,- sekali parkir dan tidak pernah memberikan SKRD/karcis”. (wawancara jum’at 8 Februari 2013 pukul 15.30 Wib)

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, penulis menemukan indikasi permasalahan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat. Adapun permasalahan yang penulis jumpai yaitu ketentuan dan larangan yang wajib dipenuhi oleh seorang juru parkir seperti yang terdapat pada Perda No 2 tahun 2009 yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh seorang juru parkir adalah :
 - a. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenalan serta kelengkapan lainnya yang ditetapkan;
 - b. Memiliki pengetahuan tentang tata cara pengaturan kendaraan baik sebelum maupun setelah parkir;
 - c. Bersikap sopan, ramah serta menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan;
 - d. Menyerahkan karcis retribusi parkir untuk sekali parkir dan menerima pembayaran;
 - e. Menyetorkan uang retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Setiap juru parkir dilarang :

- a. Memungut retribusi parkir melebihi tarif yang sudah tertera pada karcis retribusi parkir;
- b. Menggunakan karcis lebih dari satu kali.

Setelah melihat permasalahan-permasalahan yang ada di atas, maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan Darat (Studi Kasus Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum) Kota Pekanbaru”**.

1.3. Batasan Masalah

Agar dapat terfokus dalam pembahasannya maka peneliti membatasi pada implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 tentang retribusi di bidang perhubungan darat khususnya retribusi parkir di tepi jalan umum kota Pekanbaru.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, dapat dilihat bahwa retribusi parkir ditepi jalan umum belum bisa memaksimalkan pengelolaannya dengan ketentuan yang berlaku.

Maka dari itu, penulis merumuskan permasalahan penelitian menjadi dua yaitu sebagai berikut : **“Bagaimana Implementasi Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan Darat (Studi Kasus Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum) Kota Pekanbaru”?**

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah **“Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan Darat (Studi Kasus Retribusi Perkir di Tepi Jalan Umum) Kota Pekanbaru”**

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan adalah:

1. Bagi peneliti

Peneliti ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam hal pembangunan wawasan dibidang belanja daerah dalam pemerintah daerah serta sebagai ajan ilmiah yang menerapkan sebagai teori yang diperoleh selama perkuliahan.

2. Untuk pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna terhadap pemerintah dalam mewujudkan *good government*.

3. Untuk pembaca

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan bisa menjadi panduan bagi peneliti yang akan datang.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam membaca dan memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menyusunnya kedalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA,

Pada bab ini diuraikan secara teoritis Pengertian Peranan dan Pembangunan, Pengertian Pajak dan Pajak Daerah, Sistem dan Dasar Hukum Perpajakan Daerah, Prinsip dan Kriteria Perpajakan Daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang tata cara melakukan penelitian yang meliputi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis, gambaran umum wilayah, dan struktur organisasi lokasi penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

didalam bab ini membuat hasil dari penelitian dan pembahasan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dan saran-saran yang penulis anggap perlu yang berkaitan dengan hasil penelitian.